

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, bahwa proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode Tahun 2007-2012 adalah lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka daripada model rekrutmen tertutup. Partai politik dalam rangka memperoleh calon yang berkualitas, mempunyai kapabilitas dan dikenal oleh masyarakat maka telah membuka ruang bagi publik untuk munculnya nama bakal calon tidak hanya diperuntukkan bagi kader-kader partai politik melainkan juga tokoh-tokoh lain yang bukan anggota partai politik. Dalam melaksanakan proses seleksi telah melibatkan semua unsur partai misalnya melalui mekanisme konvensi yang dinilai lebih demokratis walaupun hasilnya pada akhirnya harus mendapat "restu" dari pimpinan pusat partai.

Aspek transparansi dan ruang partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap partai politik wajib memperhatikan aspirasi atau tanggapan masyarakat. Partai politik juga masih mengangkat aspek latar belakang status sosial, suku atau putra daerah bakal calon dengan tujuan untuk menarik dukungan atau suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat dan menyebabkan partai bersikap pragmatis yang hanya memperjuangkan kepentingan partai dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Kedua, Faktor kinerja, dukungan dan ikatan primordial berpengaruh secara signifikan terhadap rekrutmen calon. Besarnya pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial terhadap variabel rekrutmen terbuka tergolong kuat. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat ditarik sub kesimpulan sebagai berikut :

- a. Besarnya pengaruh variabel kinerja terhadap variabel rekrutmen terbuka tergolong kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang mencakup tingkat pendidikan, keahlian/keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang bakal calon akan menjadi faktor yang sangat penting dalam proses rekrutmen bakal calon pada pelaksanaan pilkada.
- b. Besarnya pengaruh variabel dukungan dengan variabel rekrutmen terbuka tergolong kuat. Adanya dukungan yang diberikan kepada seorang bakal calon dari berbagai unsur baik dari dalam partai (unsur partai misalnya Kino, organisasi binaan partai atau organisasi sayap partai lainnya) maupun dari kelompok-kelompok masyarakat menjadi pertimbangan dalam rekrutmen bakal calon.
- c. Besarnya pengaruh antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen terbuka termasuk dalam kategori lemah. Faktor ikatan primordial atau ikatan karena status sosial, adanya hubungan kedekatan dan kesamaan suku, etnis, agama dan latar belakang sosial yang dimiliki oleh bakal calon kurang menjadi faktor yang penting dalam proses rekrutmen yang demokratis.

Ketiga, Untuk menciptakan kehidupan politik yang mendukung ketahanan nasional suatu negara atau daerah maka dalam segala kegiatan politik harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yakni adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Pilkada adalah merupakan salah satu kegiatan politik untuk membentuk pemerintahan di daerah harus diselenggarakan secara demokratis. Sehingga pemerintah di daerah dapat mencerminkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam pilkada yang dilaksanakan di DKI Jakarta Periode 2007-2012 yang mencakup beberapa tahap termasuk pada proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum model yang diterapkan adalah model rekrutmen yang terbuka di mana bakal calon berasal dari umum bukan hanya dari partai, lebih mengutamakan kinerja dan popularitas bakal calon namun masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat misalnya dalam proses seleksi masih kurangnya akses masyarakat baik untuk memperoleh informasi maupun memberikan penilaian mengenai *track record* bakal calon.

Proses rekrutmen yang ideal yakni adanya partisipasi masyarakat baik dalam penjangkaran nama bakal calon, seleksi maupun dalam melaksanakan penilaian terhadap *track record* bakal calon sampai pada proses penetapan calon yang akan menjadi kontestan dalam pilkada. Sehingga "pasangan calon" yang telah ditetapkan dapat mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat dan akan mendukung dalam penyelenggaraan pilkada. Dan akhirnya ketika terbentuknya pemerintahan di daerah akan memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan demikian dapat menciptakan kehidupan politik yang mendukung pada Ketahanan Wilayah DKI Jakarta khususnya dan Ketahanan Nasional pada umumnya.

6.2. Saran

Mengacu kesimpulan di atas, dalam rangka upaya penyempurnaan pelaksanaan proses rekrutmen bakal calon dalam pemilihan kepala daerah, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat (publik) dalam pencalonan sesuai regulasi pilkada, maka seharusnya partai politik melakukan seleksi secara terbuka ke masyarakat dalam hal penjangkaran nama bakal calon, seleksi calon melalui mekanisme konvensi, konferensi di daerah oleh partai atau sejenisnya mulai dari tingkat kepengurusan yang terendah misalnya di tingkat ranting. Sehingga akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen lebih terbuka dan calon yang ditetapkan mencerminkan aspirasi masyarakat (*grass roots*).

Kedua, mengingat bahwa pilkada pada hakikatnya adalah bagian dari pemilu di daerah dalam rangka pembentukan pemerintahan daerah dan peserta kompetisi pilkada adalah pasangan calon dan bukan partai politik seperti halnya dalam pemilu legislatif, maka semestinya terbuka peluang bagi munculnya para kandidat bakal calon kepala daerah perorangan (*independen*) yang memperoleh dukungan dari masyarakat di luar jalur partai politik.

Ketiga, bahwa agar ketahanan daerah tetap stabil atau lebih meningkat, maka salah satu aspek yang harus diciptakan adalah kehidupan politik termasuk pelaksanaan rekrutmen dalam penyelenggaraan pilkada harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Partai politik harus mempromosikan kandidat yang berkualitas yakni memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal)

di mata masyarakat. Kemudian proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari parpol, *track record* masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.

